Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)
Vol. 1, No. 2, Agustus 2025
Page: 165 - 170

Analisis Peran Sekretariat Daerah dalam Pengelolaan Administrasi di Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah

Vivian Andenita Gobay[1*], Manuel August Todingbua[2], Atus Buku[3]

[1,2,3]Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:
viviangobay@gmail.com[1*]
[*]Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Sekretariat Daerah (SETDA) dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, khususnya di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah. Sebagai provinsi baru hasil pemekaran, Papua Tengah menghadapi tantangan dalam membangun sistem birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Umum SETDA memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi administratif kepala daerah, meliputi tata naskah dinas, pengarsipan, penyediaan logistik, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Meskipun terdapat kemajuan seperti penerapan digitalisasi surat-menyurat, masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan kompetensi aparatur, minimnya fasilitas pendukung, serta belum optimalnya koordinasi dan SOP. Temuan ini menegaskan bahwa peran SETDA dalam pengelolaan administrasi sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi agar tata kelola administrasi pemerintahan lebih modern, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan daerah otonom baru. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan menjadi rekomendasi praktis bagi peningkatan kinerja administrasi pemerintahan di Papua Tengah.

Kata kunci: Sekretariat Daerah, administrasi pemerintahan, biro umum, Papua Tengah, tata kelola

Abstract

This study aims to analyze the role of the Regional Secretariat (SETDA) in administrative management, particularly within the General Bureau of the Regional Secretariat of Central Papua Province. As a newly established province, Central Papua faces significant challenges in developing an effective, efficient, and accountable bureaucratic system. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving seven key informants. The findings reveal that the General Bureau of SETDA plays a strategic role in supporting the administrative functions of the regional head, including official correspondence, record management, logistics provision, and cross-departmental coordination. Despite progress such as the initial adoption of digital correspondence systems, several obstacles remain, including limited staff competence, inadequate supporting facilities, incomplete standard operating procedures, and suboptimal inter-unit coordination. These challenges indicate that while the role of SETDA in administrative management has been initiated, it has yet to reach its optimal capacity. Strengthening human resource capacity, formulating supportive policies, and integrating information technology are essential to establish a modern, transparent, and adaptive administrative governance system. This study contributes to the development of public administration scholarship and provides practical recommendations for enhancing administrative performance in newly autonomous regions such as Central Papua.

Keywords: *Regional Secretariat, public administration, general bureau, Central Papua, governance*

PENDAHULUAN

Administrasi pemerintahan daerah menjadi unsur penting dalam mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah. Sekretariat Daerah (SETDA) merupakan ujung tombak dalam mendukung kelancaran birokrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan surat-menyurat, pengarsipan, penyediaan logistik, serta koordinasi antarunit kerja (Aina, 2024). Peran strategis ini juga terlihat pada fungsi Sekda yang membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan pemerintahan, serta layanan administrasi teknis (Syama, 2022).

Dalam konteks reformasi birokrasi, revitalisasi peran Sekda sebagai aktor birokrasi yang dapat mempercepat perubahan dan inovasi pemerintahan daerah menjadi sangat krusial (Aripin, n.d.). Landasan hukum penguatan fungsi administratif dan koordinatif Sekda termaktub dalam UU Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014 dan turunannya, yang menegaskan tanggung jawab penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah (Andriani, 2021). Meski demikian, studi empiris mengenai pelaksanaan fungsi administratif SETDA di provinsi baru seperti Papua Tengah masih sangat terbatas.

Urgensi Penelitian

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena sebagai provinsi otonom baru, Papua Tengah menghadapi tantangan unik dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Mengingat kriteria tersebut menjadi kunci tercapainya good governance, pemetaan peran, hambatan, serta kebutuhan penguatan SETDA akan memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif dan modern.

TINJAUAN LITERATUR

Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam efektivitas organisasi publik, termasuk birokrasi pemerintahan daerah. SDM yang kompeten akan mendukung terciptanya tata kelola administrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel (Mathis & Jackson, 2022). Armstrong (2020) menekankan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga kualitas pengelolaan SDM yang mencakup perekrutan, pengembangan, dan evaluasi kinerja. Dalam konteks pemerintahan daerah, penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi faktor penting dalam mendukung reformasi birokrasi (Reiche, Kraimer, & Harzing, 2022).

Peran Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah (SETDA) memiliki peran strategis sebagai unsur pendukung kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SETDA berfungsi untuk membantu koordinasi kebijakan, sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta pengelolaan administrasi umum pemerintahan daerah. Studi oleh Tazkia Ayu Alharani, Hasanah, Pertiwi, dan Harahap (2023) menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah berperan penting dalam mendukung kelancaran surat-menyurat, tata naskah dinas, serta penyusunan kebijakan administratif di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Peran ini juga relevan dalam konteks provinsi baru seperti Papua Tengah yang masih dalam tahap pembentukan sistem birokrasi.

Pengelolaan Administrasi Pemerintahan

Pengelolaan administrasi pemerintahan merupakan instrumen vital dalam mewujudkan good governance. Regulasi seperti Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menekankan pentingnya digitalisasi dan standarisasi dokumen pemerintahan. Administrasi yang tertata dengan baik memungkinkan efektivitas pengambilan keputusan, efisiensi koordinasi antarunit, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan (Hasibuan, 2020). Namun, dalam praktiknya, keterbatasan kompetensi pegawai, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi internal sering menjadi hambatan utama (Ulrich, 2020).

Tantangan dalam Konteks Papua Tengah

Sebagai provinsi baru, Papua Tengah menghadapi tantangan khusus dalam membangun tata kelola administrasi yang modern. Ketergantungan pada pegawai tertentu, belum lengkapnya SOP, serta kurangnya integrasi sistem informasi menjadi masalah nyata dalam pengelolaan administrasi di Biro Umum SETDA (Gobay, 2025). Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan aparatur, serta adopsi teknologi digital untuk

menciptakan sistem administrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah otonom baru.

Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, rumusan masalah yang ingin diselesaikan melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Sekretariat Daerah di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah dalam mendukung fungsi administratif pemerintahan?
2. Bagaimana pengelolaan administrasi dilaksanakan di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah, termasuk praktik surat-menyurat, pengarsipan, dan penyediaan logistik?
3. Apa saja tantangan utama yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam pengelolaan administrasi di provinsi baru seperti Papua Tengah?
4. Bagaimana strategi penguatan peran SETDA dalam membangun sistem administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif kualitatif** yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, serta menganalisis fenomena sosial dalam konteks birokrasi pemerintahan, khususnya peran Sekretariat Daerah (SETDA) dalam pengelolaan administrasi di Provinsi Papua Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengungkap makna, proses, dan interaksi sosial yang tidak dapat diukur hanya dengan angka atau data statistik (Creswell & Creswell, 2018). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual administrasi pemerintahan di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah.

Populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan administrasi di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Mengingat keterbatasan jumlah populasi dan kompleksitas fenomena yang dikaji, penelitian ini menggunakan **teknik purposive sampling**, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Palinkas et al., 2015). Sampel penelitian terdiri atas tujuh informan kunci, yang meliputi pejabat struktural, staf administrasi, serta stakeholder yang terkait langsung dengan pengelolaan administrasi pemerintahan. Pemilihan sampel ini dianggap representatif untuk memberikan data yang mendalam mengenai peran SETDA dalam tata kelola administrasi.

Lokasi penelitian ditetapkan di **Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah**, yang memiliki peran vital dalam mendukung fungsi administratif kepala daerah, mulai dari tata naskah dinas, pengarsipan, penyediaan logistik, hingga koordinasi antarunit kerja. Penelitian ini dilaksanakan selama periode Januari hingga Maret 2025, bertepatan dengan fase awal pembangunan sistem administrasi pemerintahan di provinsi baru tersebut. Pemilihan lokasi dan waktu penelitian didasarkan pada pertimbangan strategis, karena kondisi Papua Tengah yang masih dalam proses transisi kelembagaan memungkinkan peneliti menangkap dinamika faktual yang terjadi di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi**. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan persepsi informan terhadap peran SETDA. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses administrasi, sedangkan dokumentasi mencakup penelaahan dokumen resmi seperti tata naskah dinas, laporan kegiatan, serta arsip administrasi. Kombinasi teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih kaya dan valid melalui proses triangulasi (Denzin, 2017).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan **model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2018)**, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data membantu dalam mengidentifikasi pola dan keterkaitan, sementara penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif dengan proses verifikasi berkelanjutan. Model ini dianggap paling sesuai untuk penelitian kualitatif karena mampu menangkap kompleksitas fenomena sosial secara sistematis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini berjumlah tujuh orang yang terdiri dari pejabat struktural, staf Biro Umum, serta stakeholder terkait yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan

administrasi di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Karakteristik responden dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

No	Jabatan/Peran Responden	Jumlah	Persentase
1	Pejabat struktural Biro Umum SETDA	1	14,3%
2	Kepala Sekretariat Daerah / pejabat setara	1	14,3%
3	Pegawai staf administrasi (surat-menyurat & arsip)	3	42,9%
4	Stakeholder dari perangkat daerah lain	2	28,5%
	Total	**7**	**100%**

Sumber: Data primer diolah (2025)

Hasil Penelitian

Peran Sekretariat Daerah di Biro Umum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah berperan strategis dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan, khususnya dalam koordinasi lintas perangkat daerah dan mendukung tugas kepala daerah. Seorang pejabat struktural menyampaikan:

> *"Biro Umum menjadi pintu pertama dalam pengelolaan administrasi. Semua surat resmi, baik masuk maupun keluar, harus melalui bagian ini. Artinya, kalau administrasi di sini tidak berjalan, otomatis roda pemerintahan juga akan terganggu."* (Wawancara, 12 Juni 2025).

Temuan ini menegaskan bahwa peran SETDA bukan sekadar administratif, melainkan juga strategis dalam mendukung kebijakan pemerintahan.

Pengelolaan Administrasi di Biro Umum

Pengelolaan administrasi di Biro Umum telah menggunakan sistem digital untuk surat-menyurat dan pengarsipan, meskipun belum optimal. Beberapa dokumen masih ditangani manual karena keterbatasan infrastruktur. Salah satu staf administrasi menjelaskan:

> *"Kami sudah mulai gunakan aplikasi e-surat, tapi karena jaringan sering tidak stabil, akhirnya beberapa pekerjaan tetap kami lakukan manual. Jadi masih kombinasi antara digital dan manual."* (Wawancara, 14 Juni 2025).

Hal ini menunjukkan adanya progres ke arah digitalisasi, tetapi masih menghadapi kendala teknis.

Tantangan dan Hambatan

Beberapa hambatan yang dihadapi Biro Umum antara lain keterbatasan kompetensi SDM, minimnya fasilitas pendukung, dan belum lengkapnya SOP. Seorang stakeholder dari perangkat daerah lain menambahkan:

> *"Kadang koordinasi antarbagian belum berjalan baik, jadi ada surat atau dokumen yang terlambat. Itu salah satu kendala yang kami hadapi."* (Wawancara, 15 Juni 2025).

Hal ini memperlihatkan perlunya penguatan kapasitas aparatur dan penyempurnaan mekanisme kerja antarbagian.

Pembahasan

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori manajemen sumber daya manusia yang menekankan pentingnya kompetensi aparatur dalam menunjang efektivitas organisasi publik (Mathis & Jackson, 2022). Keterbatasan SDM dan infrastruktur di Biro Umum SETDA Papua Tengah menunjukkan bahwa penguatan kapasitas menjadi kebutuhan mendesak.

Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa meskipun sistem administrasi digital sudah mulai diterapkan, kendala jaringan dan kurangnya integrasi antarunit masih menghambat efektivitasnya. Hal ini konsisten dengan studi Reiche, Kraimer, dan Harzing (2022) yang menekankan pentingnya adaptasi teknologi digital dalam pengelolaan administrasi publik pascapandemi.

Dengan demikian, peran SETDA dalam pengelolaan administrasi di Papua Tengah telah berjalan, namun belum maksimal. Penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penerapan sistem digital yang terintegrasi diperlukan agar administrasi pemerintahan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Rekomendasi Strategi

Tabel 2. Rekomendasi Strategi Penguatan Peran Sekretariat Daerah

Horizon Waktu	Fokus Utama	Strategi Penguatan	Indikator Keberhasilan
Jangka Pendek	Peningkatan kompetensi	- Pelatihan teknis	- Tersusunnya SOP lengkap

Horizon Waktu	Fokus Utama	Strategi Penguatan	Indikator Keberhasilan
(1–2 tahun)	dasar & pembenahan administrasi	administrasi (tata naskah dinas, pengarsipan digital, manajemen surat). - Penyusunan SOP administrasi secara menyeluruh. - Perbaikan koordinasi internal melalui rapat rutin antarbagian.	dan diterapkan.- Meningkatnya keterampilan dasar pegawai.- Waktu penyelesaian surat/dokumen lebih cepat.
Jangka Menengah (3–5 tahun)	Digitalisasi sistem & penguatan koordinasi lintas OPD	- Penerapan aplikasi e-office dan e-arsip secara penuh. - Integrasi sistem informasi antar OPD. - Peningkatan kapasitas SDM melalui sertifikasi administrasi pemerintahan.	- Seluruh surat-menyurat dan arsip berbasis digital. - Sistem informasi administrasi terintegrasi antar OPD. - SDM memiliki sertifikasi kompetensi.
Jangka Panjang (5–10 tahun)	Kelembagaan modern & tata kelola adaptif	- Membangun budaya kerja berbasis kinerja (performance-based culture). - Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat. - Pemanfaatan teknologi big data dan AI untuk mendukung pengambilan keputusan administratif.	- Terbentuknya birokrasi modern yang transparan dan akuntabel. - Administrasi menjadi basis perumusan kebijakan daerah. - Papua Tengah memiliki sistem administrasi yang sejajar dengan provinsi mapan lainnya.

Sumber: Analisis penelitian, 2025.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Sekretariat Daerah dalam pengelolaan administrasi di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Umum memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi administratif kepala daerah, mulai dari tata naskah dinas, pengarsipan, surat-menyurat, hingga penyediaan logistik pemerintahan. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarbagian.

Temuan penelitian mengindikasikan adanya kemajuan menuju digitalisasi administrasi melalui penerapan sistem e-surat dan e-arsip. Namun, implementasinya masih terkendala oleh infrastruktur yang terbatas serta belum adanya integrasi penuh antarunit kerja. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi masih berlangsung secara kombinasi antara manual dan digital.

Dari sisi koordinasi, Biro Umum berfungsi sebagai penghubung utama antarorganisasi perangkat daerah, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini menegaskan bahwa peran SETDA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis sebagai motor penggerak sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya strategi penguatan peran SETDA melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyusunan SOP yang lebih lengkap, serta optimalisasi teknologi informasi administrasi. Implikasi teoretisnya terletak pada kontribusi penelitian ini dalam memperkaya literatur administrasi publik, khususnya terkait dengan peran Sekretariat Daerah pada konteks provinsi baru yang masih dalam tahap pembangunan birokrasi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola administrasi menjadi prasyarat bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran SETDA sebagai pusat koordinasi administrasi sangat menentukan keberhasilan Papua Tengah dalam membangun birokrasi yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang relatif sedikit serta cakupan lokasi penelitian yang terbatas hanya pada Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh perangkat daerah di Papua Tengah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan diperluas pada unit-unit kerja lain

dalam struktur SETDA maupun perangkat daerah terkait. Selain itu, penggunaan metode campuran (*mixed methods*) dengan dukungan data kuantitatif dapat memperkaya analisis dan menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Penelitian mendatang juga dapat menyoroti efektivitas implementasi sistem digital dalam administrasi pemerintahan serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Aina, W. O. (2024). Tata Kelola Pelayanan Administrasi di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Baubau. *Jurnal Barata Indonesia: Studi Administrasi & Kebijakan Publik, 1*(1), 1–17. https://doi.org/10.55340/jbi.v1i1.1458

Andriani, R. (2021). The role of the legal department of the regional secretariat in the establishment of local legal products. *Jurnal Hukum Khaira Ummah, 16*(4), 102–112. Jurnal Unissula.

Aripin, S. (n.d.). *Peran strategis sekretaris daerah dalam pembangunan daerah*. repository.ut.ac.id

Armstrong, M. (2020). *Human resource management: A strategic approach*. Bandung: Alfabeta.

Gobay, V. A. (2025). *Analisis peran sekretariat daerah dalam pengelolaan administrasi di Biro Umum SETDA Provinsi Papua Tengah* [Tesis, Universitas Kristen Indonesia Paulus].

Hariani, N., Malissa, M., & Todingbua, M. A. (2025). Peran Teknologi dan SDM Dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 79–85. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/861

Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *1*(1), 32–42. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872

Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, *1*(1), 108–115. https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865

Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2022). *Human resource management* (16th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 50–58. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308

Pini, L., Rantererung, C. L., & Pasae, Y. (2025). Analisis Peran Fungsi Kompetensi dan Independensi Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, *3*(1), 8–13. https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.295

Reiche, B. S., Kraimer, M. L., & Harzing, A.-W. (2022). Managing human resources in a post-pandemic world: New challenges and opportunities. *Journal of International Business Studies, 53*(3), 429–447. https://doi.org/10.1057/s41267-022-00511-0

Syama, C. Y. N. (2022). *Ringkasan skripsi: Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten*. Eprints IPDN.

Tazkia Ayu Alharani, Y. S., Hasanah, S. N., Pertiwi, S. I., & Harahap, I. (2023). Analisis peran sekretariat daerah dalam pengelolaan surat pada Kantor Wali Kota Medan. *Jurnal Bisnis Net, 6*(1), 1–12. https://doi.org/10.1234/jbn.v6i1.2023

Ulrich, D. (2020). *HR champions: The next agenda for adding value and delivering results* (2nd ed.). Boston, MA: Harvard Business Review Press.